

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan serta berkelanjutan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya (Nangarumba, 2015). Peningkatan standar dan taraf hidup masyarakat di berbagai lapisan dalam suatu negara merupakan tujuan utama bagi seluruh negara. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi sumber daya yang dimiliki, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan-rancangan pembangunan yang dilaksanakan oleh partisipasi masyarakat dengan tujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal itu merupakan salah satu target utama yang ingin dicapai bagi seluruh negara baik negara maju ataupun negara berkembang, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih baik berdampak terhadap tingkat kesejahteraan yang juga lebih baik.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari besarnya laju pertumbuhan ekonominya. Menurut Sukirno (2006) dalam Nugroho (2014) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang memberikan gambaran dari perkembangan perekonomian suatu wilayah dalam suatu periode tahun tertentu dengan periode tahun sebelumnya. Perekonomian dapat diartikan mengalami suatu pertumbuhan yang berkembang ketika tingkat kegiatan ekonominya mengalami peningkatan dibandingkan dengan apa yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu pembangunan

nasional maka setiap daerah harus menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Secara terotitis, apabila suatu negara ataupun daerah tengah mengalami perekonomian yang pertumbuhan ekonominya sedang tinggi maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat didalamnya mengalami peningkatan sebagai dampak yang diciptakannya (Iswanto, 2015).

Menurut Yuliani (2015) pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan indikator kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan tersebut maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata. Distribusi pendapatan yang lebih merata dinilai mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga mampu mengatasi masalah kemiskinan di suatu wilayah. Akan tetapi, menurut Arsyad dalam Iswanto (2015) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sedang mengalami peningkatan hanya akan berdampak ataupun memberikan sedikit manfaatnya terhadap masalah kemiskinan di periode tahun yang sama. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu untuk memberikan dampak positifnya terhadap taraf hidup bagi masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun belum bisa berbuat banyak terhadap masalah mendasar seperti kemiskinan biasanya terjadi karena kurangnya perhatian dari para pengambil kebijakan terhadap pembangunan ekonomi yang tidak merata sehingga menghasilkan ketimpangan atau permasalahan kesenjangan di mana dalam hal ini merupakan ketimpangan pendapatan. Menurut Yuliani (2015) keterkaitan yang cukup erat antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan

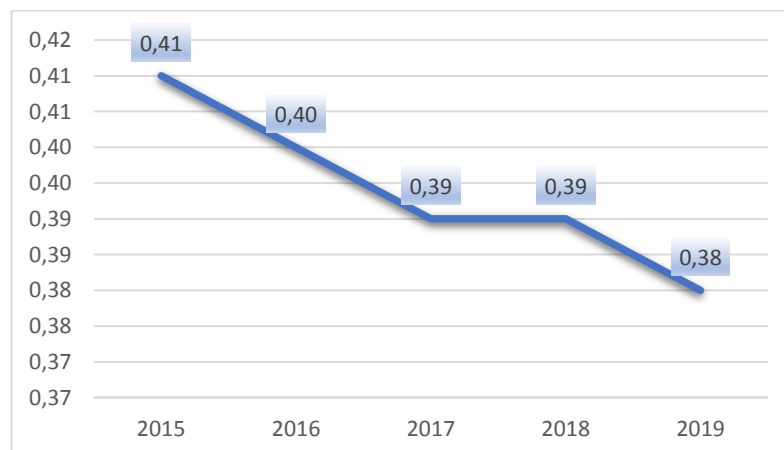
pendapatan merupakan topik ekonomi pembangunan yang cukup menarik dalam kehidupan masyarakat serta stabilitas sosial. Dalam perekonomian, ketimpangan pendapatan antar daerah dalam suatu wilayah atau pentingnya pemerataan distribusi pendapatan tidak boleh dijadikan sebagai topik yang harus diabaikan atau dikesampingkan. Pasalnya, apabila tidak ada pemerataan distribusi pendapatan maka peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki modal atau masyarakat kalangan atas saja.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berusaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah adanya kesenjangan ataupun ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara golongan berpendapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah (Damanik et al., 2018). Masalah ketimpangan pendapatan sebenarnya tidak hanya melanda negara-negara yang sedang berkembang saja, akan tetapi negara maju pun juga menghadapi masalah yang serupa. Perbedaannya hanya terletak pada proporsi atau seberapa besar keparahan dari tingkat ketimpangan yang tengah terjadi, serta faktor-faktor apa saja yang mendominasi terjadinya masalah ketimpangan tersebut. Adapun dalam mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia, BPS menggunakan indeks gini (gini ratio) di mana kisaran angka indeks gini antara 0 hingga 1. Apabila indeks gini mendekati angka 0, maka ketimpangan pendapatan

dikategorikan rendah atau merata. Sebaliknya apabila indeks gini mendekati angka 1, maka ketimpangan pendapatan dikategorikan tinggi atau melebar.

Pembangunan ekonomi yang sampai saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengalami perbaikan yang cukup berarti dalam mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut dibuktikan dengan grafik penurunan dari indeks gini Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hasil kerja keras dari pemerintah Indonesia tentu patut untuk diberikan apresiasi karena dengan menurunnya indeks gini atau ketimpangan pendapatan, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi sehingga mampu keluar dari masalah kemiskinan. Perkembangan dari Indeks Gini Indonesia akan tersaji dalam Gambar 1 - 1.

Gambar 1 - 1
Indeks Gini Indonesia, 2015-2019 (Indeks)



Sumber : BPS Indonesia (diolah)

Masalah ketimpangan pada hakekatnya tidak dapat untuk dimusnahkan, akan tetapi masalah tersebut dapat dikontrol atau ditekan hingga pada tingkat yang lebih terpelihara (Putri et al., 2015). Berdasarkan Gambar 1 - 1 yang telah disajikan,

dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 indeks gini Indonesia mengalami penurunan di mana pada tahun 2015 indeks gini tercatat sebesar 0.41, turun menjadi sebesar 0.40 pada tahun 2016 dan kembali turun menjadi sebesar 0.39 di tahun 2017. Pada tahun 2018 indeks gini berada pada level yang sama yaitu mencatatkan nilai indeks gini sebesar 0.39 dengan kata lain tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, namun di tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 indeks gini Indonesia mengalami penurunan kembali sebesar 0.38. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun laju dari penurunan indeks gini di Indonesia sedikit lamban, akan tetapi selama periode tersebut sudah terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di Indonesia.

Nilai indeks gini di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ketimpangan pendapatan dari seluruh provinsi yang menjadi bagian didalamnya. Menurut Darzal (2016) kebijakan otonomi daerah ditujukan agar pembangunan antar wilayah di Indonesia dapat merata. Akan tetapi perbedaan ketersediaan kandungan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kualitas SDM, dan persebaran sarana serta prasarana yang dinilai belum merata menimbulkan adanya keterbelakangan wilayah sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan antar wilayah-wilayah di Indonesia terjadi karena ketidakmerataan dari distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat. Adapun perkembangan dari indeks gini Indonesia berdasarkan provinsi akan disajikan dalam Tabel 1-1.

Tabel 1 - 1
Indeks Gini Berdasarkan Provinsi di Indonesia (Indeks)

No	Provinsi	Rata-Rata
1	ACEH	0.33
2	SUMATERA UTARA	0.32
3	SUMATERA BARAT	0.32
4	RIAU	0.34
5	JAMBI	0.34
6	SUMATERA SELATAN	0.35
7	BENGKULU	0.36
8	LAMPUNG	0.35
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0.28
10	KEP. RIAU	0.34
11	DKI JAKARTA	0.41
12	JAWA BARAT	0.41
13	JAWA TENGAH	0.37
14	DI YOGYAKARTA	0.43
15	JAWA TIMUR	0.39
16	BANTEN	0.39
17	BALI	0.37
18	NUSA TENGGARA BARAT	0.37
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0.35
20	KALIMANTAN BARAT	0.33
21	KALIMANTAN TENGAH	0.34
22	KALIMANTAN SELATAN	0.34
23	KALIMANTAN TIMUR	0.33
24	KALIMANTAN UTARA	0.30
25	SULAWESI UTARA	0.38
26	SULAWESI TENGAH	0.35
27	SULAWESI SELATAN	0.41
28	SULAWESI TENGGARA	0.40
29	GORONTALO	0.42
30	SULAWESI BARAT	0.36
31	MALUKU	0.34
32	MALUKU UTARA	0.30
33	PAPUA BARAT	0.40
34	PAPUA	0.40

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

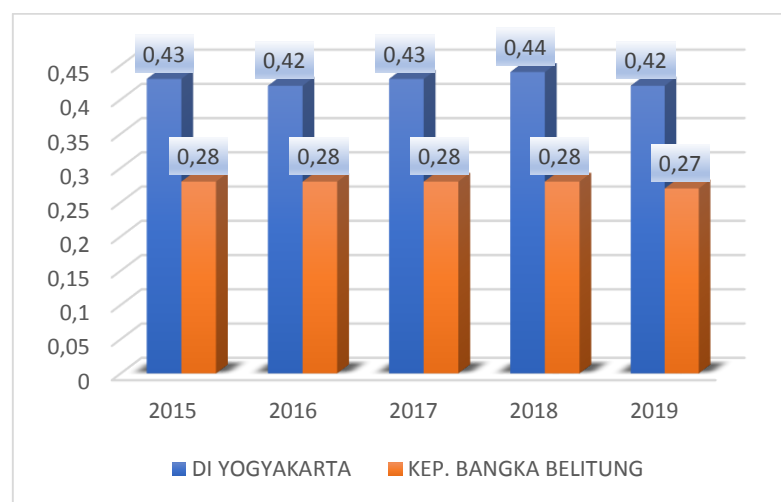
Berdasarkan Tabel 1 yang telah disajikan, maka dapat diketahui bahwa provinsi dengan rata-rata indeks gini terbesar di Indonesia selama tahun 2015-2019 adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan mencatatkan nilai rata-rata indeks gini sebesar 0.43%. Selama tahun 2015-2019 DI Yogyakarta mencatatkan nilai indeks gini yang berfluktuasi di mana pada tahun 2015 indeks gini tercatat sebesar 0.43, tahun 2016 sebesar 0.42, tahun 2017 kembali menjadi 0.43, tahun 2018 naik menjadi 0.44, dan tahun 2019 turun menjadi 0.42. diurutan selanjutnya rata-rata indeks gini di Indonesia setelah Provinsi DI Yogyakarta adalah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan yang secara berurutan mencatatkan nilai rata-rata indeks gini sebesar 0.42 dan 0.41.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan provinsi dengan nilai rata-rata indeks gini paling rendah di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2015-2019, maka didapatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mencatatkan nilai rata-rata hanya 0.28. Pada Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2018 angka indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengalami kenaikan atau penurunan yaitu dengan mencatatkan indeks gini sebesar 0.28. Bahkan ditahun selanjutnya indeks gini Povinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan menjadi sebesar 0.27.

Rendahnya angka indeks gini dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan provinsi lainnya selama kurun waktu 5 tahun belakangan tentu menunjukkan keberhasilan dari pemerintah daerah tentang berbagai program pengelolaan sumberdaya baik sumber daya alam yang dimilikinya maupun sumber

daya manusianya. Pencapaian tersebut haruslah terus ditingkatkan, mengingat rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Apabila dibandingkan dengan Provinsi DI Yogyakarta, maka banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Pemprov DIY untuk mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Pasalnya, pemerataan pendapatan merupakan salah satu faktor yang penting apalagi mengingat Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi yang dapat dikategorikan potensial dengan potensi perkembangan ekonomi yang terbilang cukup besar. Perbandingan antara indeks gini dari Provinsi DI Yogyakarta dengan Bangka Belitung akan disajikan dalam Gambar 1 - 2.

Gambar 1- 2
Perbandingan Indeks Gini Provinsi DIY
Dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2015-2019 (Indeks)



Sumber : BPS Indonesia (diolah)

Masalah ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia merupakan masalah yang harus terus diperangi agar tidak melebar ke masalah-masalah baru yang akan muncul sebagai akibatnya seperti masalah kemiskinan. Tingkat

kemiskinan disuatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kesenjangan distribusi pendapatan, karena distribusi pendapatan yang merata akan berpengaruh terhadap masyarakat kalangan menengah bawah untuk terus meningkatkan kualitas pendapatan mereka sehingga dapat keluar dari masalah kemiskinan. Sebaliknya, apabila distribusi pendapatan tidak merata di setiap wilayah menyebabkan masyarakat menengah bawah menjadi lebih sulit dalam meningkatkan kualitas pendapatan mereka sehingga akan mempersulit posisi mereka untuk keluar dari masalah kemiskinan (Ahmad dan Triani, 2019).

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik serta menganggap penting untuk dilakukan penelitian mengenai masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan harapan dapat memberikan hasil-hasil temuan yang mungkin saja berguna atau dibutuhkan untuk dipergunakan oleh pihak-pihak terkait. Meskipun sangat tidak mungkin apabila harus menekan angka ketimpangan hingga angka yang sempurna, namun upaya dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan ke level yang rendah secara berkelanjutan harus selalu diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan cara menganalisis determinan dari ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Determinan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini akan mengambil beberapa variabel yang pernah dipakai oleh beberapa peneliti-peneliti sebelumnya, di mana beberapa determinan yang dipergunakan terbukti memiliki dampak yang cukup berarti terhadap masalah ketimpangan pendapatan. Penulis akan

menggunakan determinan yaitu berupa variabel pertumbuhan ekonomi pada sisi makroekonomi serta variabel tingkat pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka), pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada sisi sosial dan kependudukan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2019**. Penulis bermaksud untuk menganalisis serta mengungkap faktor-faktor apa saja yang sebenarnya menjadi penentu ketimpangan pendapatan di Indonesia selama kurun waktu tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut telah didapatkan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimanakah pengaruh dari tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimanakah pengaruh dari rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019 ?
4. Bagaimanakah pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019 ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh dari tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh dari rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian yang sejenis dalam rangka memecahkan masalah ketimpangan pendapatan.
2. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam upaya untuk mengentaskan masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi. Variabel yang digunakan dalam menguji serta menganalisis masalah dalam penelitian ini merupakan indikator yang cukup penting. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mempertimbangkan strategi kedepan ataupun program-program yang akan mendatang.
3. Bagi masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia, hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi tambahan informasi mengenai apa saja yang

menyebabkan masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tersampainya hasil penelitian ini kepada masyarakat diharapkan agar kedepannya masyarakat beserta pemerintah daerah terkait dapat berjalan bersama-sama dengan memunculkan terobosan-terobosan baru dalam upaya menanggulangi masalah ketimpangan pendapatan.

E. Metode Penelitian

E.1. Data Dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan rentang waktu pengamatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Metode pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menerjemahkan data menjadi angka yang kemudian akan dianalisis berdasarkan hasil temuannya. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini akan menggunakan teknik studi pustaka atau dokumentasi. Alasan penulis menggunakan teknik ini adalah dengan menggunakan studi pustaka atau dokumentasi, penulis dapat menghimpun data yang merupakan data sekunder pada setiap variabel yang diteliti. Data variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup 34 Provinsi di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber seperti publikasi *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional serta publikasi-publikasi lainnya.

E.2. Alat Dan Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 provinsi di Indonesia pada tahun

2015-2019. Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Dengan demikian model ekonometrik yang akan dipakai dalam penelitian ini akan mereplika persamaan dari penelitian (Zaini, 2017) :

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 \log RLS_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana :

IG	= Indeks Gini (Indeks)
PE	= Pertumbuhan Ekonomi (%)
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
RLS	= Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
β_0	= Konstanta
\log	= Logaritma Natural
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien regresi variabel 1 – 4
ε	= <i>error term</i> (faktor kesalahan)
i	= Observasi ke i
t	= Tahun ke t

Dalam mengestimasi model ekonometrik di atas, beberapa pilihan dapat digunakan sebagai tahapan tersebut diantaranya *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Model *Common Effect* adalah pendekatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* terlebih dahulu yang kemudian dilakukan estimasi model dengan metode OLS. Model selanjutnya adalah *Fixed Effect Model* di mana model ini memiliki konstanta (*intercept*) yang berbeda-beda akan tetapi memiliki kesamaan koefisien regresi/slope. Pemilihan

model terakhir dalam data panel adalah model *Random Effect* di mana perbedaan baik antar unit maupun antar waktu dapat diamati dari besarnya *error*.

Berdasarkan ketiga pilihan dalam melakukan tahapan estimasi model tersebut, nantinya akan dipilih salah satu model saja yang merupakan model terbaik dengan cara melakukan uji chow, uji hausman dan uji *lagrange multiplier* (LM). Penggunaan uji chow dalam pemilihan model terbaik disini adalah untuk membandingkan model manakah yang paling tepat digunakan antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Penggunaan dari uji hausman sendiri adalah membandingkan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* untuk dicari model manakah yang paling tepat digunakan dalam data panel. Sedangkan pengujian *Langrange Multiplier* (LM) dipergunakan apabila uji chow dan uji hausman menunjukkan model yang terpilih CEM dengan REM.

Setelah menghasilkan model manakah yang merupakan model terbaik, kemudian dilakukan uji hipotesis meliputi uji t-Statistik, uji F-Statistik dan uji koefisien determinasi (*R-Square*). Uji t-Statistik atau biasa disebut Uji t pada intinya memperlihatkan sejauh mana keterkaitan variabel-variabel independen didalam model secara individu dalam menjelaskan variabel dependen. Hampir sama dengan uji t, uji F-Statistik atau biasa disebut dengan uji F pada intinya memperlihatkan sejauh mana keterkaitan variabel-variabel independen didalam model secara bersama-sama atau secara keseluruhan dalam menjelaskan variabel dependen. Selain itu, koefisien determinasi atau biasa disimbolkan dengan R^2 merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar sumbangan ataupun

kemampuan variasi variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian, sistematika pembahasan digunakan dengan tujuan untuk memahami uraian-uraian atau gambaran secara terperinci mengenai hal-hal yang akan ditulis. Oleh karena itu, sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi alat dan model penelitian serta data dan sumber data yang digunakan. Bab pendahuluan akan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini akan menguraikan beberapa teori-teori yang mendukung untuk dijadikan landasan dalam penelitian diantaranya teori-teori tentang ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menguraikan beberapa penelitian terdahulu guna menunjukkan orisinalitas penelitian dan menggambarkan kerangka berpikir dengan tujuan untuk memusatkan pemahaman antar variabel yang telah dipilih. Bab tinjauan pustaka ini akan diakhiri dengan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini akan menguraikan alat dan model analisis yang digunakan serta menjelaskan bagaimana proses atau tahapan estimasi model ekonometrik dan uji hipotesisnya. Bab metode penelitian akan diakhiri dengan menguraikan jenis dan sumber data yang terdiri dari definisi operasional variabel dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan menyajikan hasil dari estimasi model beserta pembahasan serta interpretasi kuantitatifnya. Bab ini akan diakhiri dengan dengan interpretasi ekonomi yang menguraikan deskripsi kondisi ekonomi yang sesuai dengan interpretasi kuantitatifnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan memuat kesimpulan dari pembahasan yang sudah dilakukan, diakhiri dengan saran kebijakan yang ditujukan bagi lembaga pembuat kebijakan, *stakeholder* dan peneliti selanjutnya.